

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. PAHLAWAN NO. 14 PAYAKUMBUH, TELP. 0752-92049 FAX.0752-91094

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jln.Pahlawan No.14 Ibh Telp (0752) 92049 Fax (0752) 91094 Payakumbuh

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : /524/SKT/Disnak&KH-2020

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, maka materi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah perlu dijabarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam suatu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA :** Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisikan :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, yang memuat informasi tentang pelaksanaan Renja Disnak & Keswan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, analisis kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, kemudian dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran Renja, dan program serta kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021.
- IV. Penutup, yang berisi beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2021.

**KETIGA :** Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan tersebut pada tahun 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATA HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Ir. INDRA SURIANI**  
NIP. 19670812 199303 2 011

## DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN .....	
		1.1 Latar Belakang .....	1
		1.2 Landasan Hukum .....	4
		1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
		1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	12
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnak& Keswan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disnak&Keswan.....	12
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disnak&Keswan .....	20
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disnak&Keswan.....	23
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	57
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	57
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disnak&Keswan .....	68
		3.3 Program dan Kegiatan .....	72
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .....	80
BAB V	:	PENUTUP .....	91



## DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN .....	1
		1.1 Latar Belakang .....	1
		1.2 Landasan Hukum .....	4
		1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
		1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	10
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	25
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	28
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	48
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DISNAK KESWAN	56
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	64
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .....	75
		3.3 Program dan Kegiatan .....	80
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN .....	78
BAB V	:	PENUTUP .....	82

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel T-C.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	.....	13
2.	Tabel T-C2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	27
3.	Tabel T-C 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	28
4.	Tabel T-C4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	.....	49
5.	Tabel T-C5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	87

## **KATA PENGANTAR**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang struktur perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2021 tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 tahun 2018. Dimana perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2021.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan bermanfaat dan direndahi oleh Allah SWT.

Payakumbuh, November 2019

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. PRIYADI BUDIMAN**  
NIP. 19621126 198903 1 003

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat

ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Sistem informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Perbup sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Rancangan awal renja merupakan bahan awal untuk penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan konsultasi publik yang merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Rancangan awal Renja PD dibahas dalam forum dan lintas OPD yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja PD yang kemudian di verifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat keselarasan antara Rancangan Renja PD dengan Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan untuk Rancangan awal RKPD. Selanjutnya Rancangan akhir RKPD dibahas dengan kepala OPD untuk memastikan program dan kegiatan OPD terakomodir didalam rancangan akhir RKPD yang diPerkadakan dan rancangan akhir Renja PD selanjutnya diverifikasi Bapelitbang dan diPerkadakan.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD
4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Renstra Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja PD sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra PD dan Renja PD dalam rangka penyusunan Renstra PD dan Renja PD, PD melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman kepada Renstra PD, hasil evaluasi renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan berpedoman pada Renstra PD bertujuan untuk menjami kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dengan Renstra PD yang terkait dengan Renstra Provinsi dan Renstra K/L.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Menjabarkan visi, misi OPD serta tujuan, sasaran, target kinerja program dan kegiatan yang tertuang didalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ditujukan untuk :

1. Memberi arah dan mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memiliki semangat dan kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasan dan evaluasi.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN**

### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak lanjut

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memperhatikan tabel C1 yakni tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra s.d tahun 2020 (tahun berjalan), maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan mempedomani target renja tahun 2020 dan hasil/keluarannya maka ada kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2019 realisasi keuangan sebesar 86,24% dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan sebesar 86,24% disebabkan karena ada kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan oleh kegiatan tersebut wewenangnya bukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kelompok penerima tidak sesuai dengan pengarahannya teknis yang telah ditetapkan oleh Dins Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan. Secara umum dapat dilihat bahwa realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan.
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada kendala dan permasalahan yang berarti, hal ini dibuktikan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan yang ditargetkan.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan;
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Perkiraan capaian kinerja s.d tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s.d tahun 2020 (tahun berjalan)).



**TABEL T- C.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Nomor Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (OutPut)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2020 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Wajib</b>									
1	21	01								
1	21	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Out Put : Tersedianya jasa surat menyurat berupa : Materai 3000 dan 6000, Amplop, Lembar Disposis dan Jasa Pengiriman  Outcome : Meningkatkan dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	49 %	12 bulan	11 bulan	100,00
								12 bulan	36 bulan	60,00

1	21	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Out Put : Tersedianya penerangan, air bersih dan lancarnya komunikasi dinas  Out Come : Lancarnya komunikasi, air bersih, dan penggunaan listrik kantor	100 %	49 %	12 bulan	11 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya honorarium aparatur kegiatan dinas  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	100 %	49 %	12 bulan	11 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan kebersihan kantor	100 %	49 %	12 bulan	11 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	49 %	12 bulan	11 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	49 %	12 bulan	11 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	49 %	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00

0 3	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatnya pengetahuan ASN	100 %	25 %	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1	21	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu dinas  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi	100 %	49 %	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	18	Rapat-rapat Kordinasi dn Konsultasi Ke Luar Daerah	Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	49 %	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>								
1	21	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output : Tersedianya mobil untuk kepala dinas yang menunjang operaional tugas sehari-hari  Out Come : Meningkatnya sarana dan prasarana	2 Unit	50 %				1 unit-	1 unit	50.00 -
1	21	02	12	Pengadaan alat alat angkutan darat bermotor	Output : Tersedianya kendaraan roda dua untuk aparatur  Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Unit	0 %		-	-	-	-	-
2 1	04	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Out Put : Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas / operasional  Out come : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	49%	66%	60 %	60 %	83%	83	

1	21	16		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Meningkatnya kulaitas kelompok tani ternak baik adm maupun pengembangan usaha kelompok</b>								
1	21	16	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Output : Terlaksananya peningkatan pemberdayaan anggota kelompok tani ternak  Out Come : Meningkatnya kualitas kelompok tani ternak baik adm maupun pengembangan usaha kelompok	250 kelompok	150 kelompok	50 kelompok	50 kelompok	100,00	50 kelompok	200 kelompok	80,00
				<b>Urusan Pertanian</b>									
2	01	21		<b>Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak</b>								
2	01	21	01	Pendataan Masalah Peternakan	Output : Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini Terlaksananya pendataan dan pembinaan toko obat hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan yang profesional  Out Come : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	25 PHMS	15 PHMS	5 PHMS	5 PHMS	100,00	5 PHMS	20 PHMS	80,00
2	01	21	02	Pemeliharaan kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Output : Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular  Out Come : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	61000 dosis	3.700 dosis	1.050 dosis	1.050 dosis	100,00	2.250 dosis	7.000 dosis	11,47
2	01	21	03	Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	Output : Terlaksananya Pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit hewan menular rabies dan AI Out Come : Meningkatnya pengendalian	25000 ekor	5400 ekor	100 ekor	50 ekor	100,00	50 ekor	5400 ekor	21,6

					dan penanggulangan penyakit ternak								
2	01	21	04	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	- Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	65 Kec	26 Kec	13 Kec	13 Kec	100,00	13 Kec	52 Kec	86,66
					- Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)	30 TPH	12 TPH	6 TPH	6 TPH	100,00	6 TPH	24 TPH	80,00
					- Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan	25 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	100,00	10 sampel	30 Sampel	120,00
2	01	22		<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	- Terlaksananya pengawasan pangan asal hewan	25 Pasar	10 Pasar	5 pasar	5 pasar	100,00	5 pasar	20 Pasar	80,00
2	01	22	01	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak	- Tersedianya sarana dan prasarana peralatan IB dan reproduksi ET pada seluruh pos IB di Kab. Lima Puluh Kota	65000 dosis	12000 dosis	10.000 dosis	10.000	-100,00	12500 dosis	34500 dosis	53,08
2	01	22	02	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	- Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di IB	15000 ekor	4000 ekor	6000 ekor	1000 ekor	16,66	3000 ekor	12.920 ekor	86,13
					- Terlaksananya pembinaan , monitoring dan evaluasi IB dan ET	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
					- Terlaksananya PKB dan kegiatan lainnya pada bidang produksi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
2	01	22	03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	- Terlaksananya pengadaan ternak dan pendistribusiannya untuk kelompok tani di Kabupaten Lima Puluh Kota	145 ekor	53 ekor	16 ekor	34 ekor	212,5	30 ekor	117 ekor	80,68
					- Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit ternak kepada masyarakat dan kegiatan lainnya di bidang produksi	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	48 bulan	80,00
2	01	22	05	Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak	- Terlaksananya kegiatan pengolahan pakan alternatif pada kelompok tani	74 kelompok	20 kelompok	10 kelompok	8 kelompok	80,00	15 kelompok	43 kelompok	58,10

					- Terlaksananya kegiatan percobaan pakan konsentrat sapi potong pada kelompok tani	115 ekor	25 ekor	10 ekor	10 ekor	100,00	25 ekor	60 ekor	52,17
2	01	22	06	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	- Tersedianya bahan penyuluhan (buku) tentang gizi dan pakan ternak	250 buku	50 buku	100 buku	10 buku	20,00	50 buku	210 buku	84,00
2	01	22	08	Pengembangan agribisnis peternakan	- Tersedianya vaksin anti rabies untuk petugas kesehatan hewan	10000 dosis	4000 dosis	1500 dosis	1200 dosis	80,00	2000 dosis	5200 ekor	52,00
2	01	22	08	Pengembangan agribisnis peternakan	- Teregisternya kandang ternak unggas dan ternak besar	750 plang	250 plang	225 plang	225 plang	100,00	250 plang	725 plang	96,67
2	01	23		<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>									
2	01	23	05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan	- Terpelihara dan terawat nya pasar ternak	10 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00	2 lokasi	8 lokasi	80,00
2	01	23	07	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	- Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	3 kali	80,00
2	01	24		<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>									
2	01	24	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsinnak	32 paket	17 paket	7 paket	6 paket	85,71	7 paket	23 paket	71,87
2	01	24		<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan lapangan</b>									
2	01	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH)	80 orang	19 orang-	19 orang -	19 orang -	100,00 -	19 orang	38 orang	47,5

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan tolok ukur dan indikator kinerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan lebih jauh kedalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan Tolok Ukur dan Indikator Kinerja tersebut terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan dengan tabel T-C.30 yang berisikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

**TABEL T-C.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO.	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATT ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Meningkatnya Produk Peternakan yang Berkualitas	Meningkatnya status kesehatan hewan ternak	Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS)	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
2.	Meningkatnya pendapatan peternak	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	1. Persentase peningkatan populasi ternak yang berkualitas	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
			2. Persentase peningkatan produksi ternak yang berkualitas	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
		Meningkatnya pemasaran produk peternakan	1. Persentase Peningkatan Jumlah produk peternakan yang dipasarkan	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
			2. Persentase Jenis produk peternakan yang dipasarkan	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
			3. Persentase Kegiatan Promosi produk peternakan	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	



**TABEL T-C.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK KD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2019	Tahu (thn n-1) 2020	Tahun (thn n) 2021	Tahu (thn n +1) 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)			(13)
1.	Persentase pertumbuhan sektor peternakan terhadap PDRB			2,46	2,59	2,57	2,70				2,57	2,70	

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

### A. Tingkat Kinerja pelayanan OPD dan hal-hal Kritis terkait pelayanan OPD

Memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2019 sebagaimana yang tertuang pada LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

#### 1. SASARAN STRATEGI 1 : “**Meningkatnya Status Kesehatan Hewan**“

##### • **INDIKATOR UTAMA :**

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Prediket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	2 %	2 %	100 %	Sangat Tinggi

Penyakit hewan menular strategis merupakan salah satu ancaman dalam peningkatan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengendalian dan penanggulangan PHMS yang menjadi prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penyakit Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Jembrana dan Seticimia Epiizootica. Tindakan pengendalian dan PHMS yang dilaksanakan berupa komunikasi Informasi dan Edukasi ke peternak, vaksinasi, pengendalian vektor dan pengawasan lalu lintas, adapun kasus PHMS sebagai berikut :

No.	Jenis PHMS	Kasus Th 2017	Kasus Th 2018	Keterangan
1.	Rabies	105 kasus, positif rabies 10 ekor	104 kasus, positif rabies 14 ekor	
2.	SE	3 Kecamatan	-	
3.	Jembrana	2 Kecamatan	-	
4.	AI	-	5 Kecamatan	
5.	Brucellosiss	-	-	

Terjadi peningkatan kasus rabies pada daerah baru, serta kasus AI terjadi pada ayam layer disebabkan karena lemahnya biosekuriti dan vaksinasi yang kurang optimal. Sedangkan untuk SE, Jembrana dan Brucellosiss tidak ada kasus karena terlaksananya vaksindengan baik dan maksimal.

Secara umum dan kalau dirata-ratakan target persentase penanggulangan dan pencegahan penyakit menular strategis sebesar 2 % tercapai, hanya kasus rabies dan AI yang terjadi di beberapa kecamatan, namun hal ini tidak terlalu signifikan dibanding tahun lalu dan dapat diatasi dengan program dan kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Pulu Kota. Artinya capaian kinerja dengan indikator pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular PHMS pada tahun 2018 termasuk kategori **sangat tinggi**.

## 2. SASARAN STRATEGI 2 : “Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak“

### • INDIKATOR UTAMA :

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Prediket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	Persentase peningkatan populasi ternak yang berkualitas	2 %	2 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan produksi ternak yang berkualitas	2 %	2 %	100 %	Sangat Tinggi

Peningkatan populasi ternak yang berkualitas dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas akan meningkatkan produksi pangan asal ternak yang bermuara akan meningkatnya pendapatan peternak yang merupakan tujuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Komoditi	Populasi Th 2017	Populasi Th 2018	Ket.
1.	Sapi Potong	36.043	39.689	
2.	Ayam Ras Petelur	6.349.407	7.450.450	
3.	Ayam Ras Pedaging	14.947.100	14.939.500	

#### a. Jumlah Sapi Potong

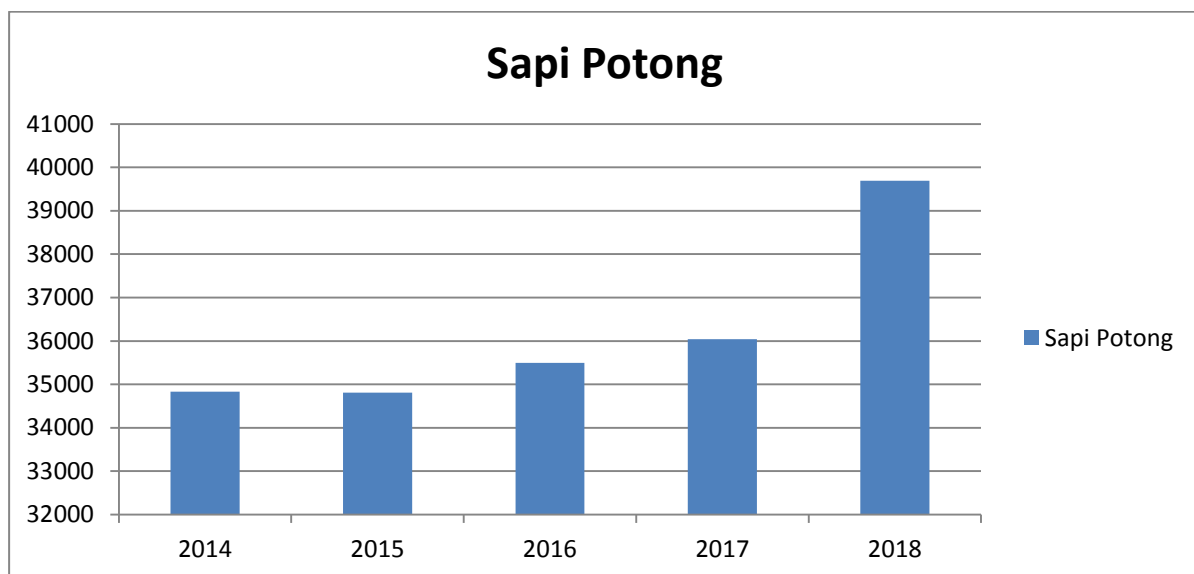
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa populasi sapi potong pada tahun 2017 sebanyak 36.043 ekor sementara target untuk tahun 2018 sebanyak 39.689 ekor hal ini berarti persentase peningkatan jumlah sapi potong sebesar 10,11 % artinya jumlah sapi potong realisasinya diatas angka yang ditargetkan untuk tahun 2018 yaitu peningkatan sebanyak 2 %, artinya dari tahun ke tahun populasi sapi potong di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena peternak masih banyak yang bertahan dengan ternak sapi ditambah dengan adanya sapi bantuan sumber dana APBD dan APBN. Capaian kinerja indikator jumlah sapi potong pada tahun 2018 masuk kategori **sangat tinggi**.

Peningkatan laju pertumbuhan sapi potong cenderung lambat karena kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wilayah kawasan sentra sapi bibit, dimana anak sapi sudah dijual yang menyebabkan jumlah atau populasi sapi potong di Kabupaten Lima Puluh Kota agak sedikit lambat laju pertumbuhannya yaitu sebanyak 99,55 %.



Gambar 3.1. Kandang Sapi Pedaging

Jumlah sapi potong di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.2. Jumlah Sapi Potong Tahun 2014-2018

#### **b. Jumlah Ayam Petelur**

Dari Data statistik Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 bahwa populasi ayam ras petelur pada tahun 2017 sebanyak 6.349.407 ekor

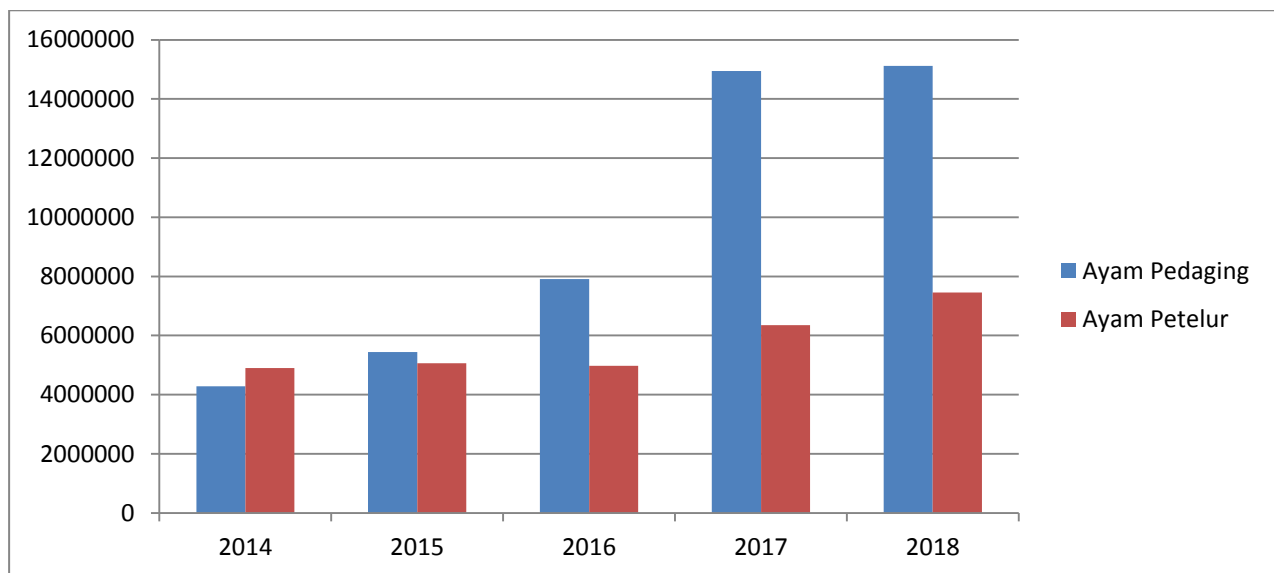
sedangkan ditahun 2018 populasi ayam ras petelur sebanyak 7.450.450 ekor, hal ini terjadi peningkatan sebesar 17,34 % sementara yang ditargetkan secara umum yaitu 2 %. realisasi ini yang juga seiring dengan kenaikan produksi telur, hal ini juga disebabkan karena harga telur yang bagus di pasaran sehingga peternak pada umumnya menambah populasi ayam petelur di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi ini jauh beda dengan tahun 2016, dimana populasi ayam ras petelur dan produksi telur mengalami penurunan. Persentase kenaikan sebesar 17,34 %, Capaian kinerja indikator jumlah ayam petelur pada tahun 2018 masuk kategori **sangat tinggi**.

Jumlah populasi ayam petelur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat hal ini disebabkan karena peternak dengan populasi besar atau skala besar tambah berkembang dalam usahanya dimana pola peternak skala besar tersebut lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan pemanfaatan tenaga kerja sehingga usahanya makin berkembang yang disertai dengan peningkatan populasi ternak ayam ras sehingga produksi telur pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.



Gambar 3.3. Kandang Ayam Petelur (Layer)

Populasi Ayam Pedaging dan ayam petelur di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.4. grafik ayam pedaging dan ayam petelur tahun 2014-2018

### c. Jumlah Ayam Pedaging

Dari data statistik tahun 2017 dapat dilihat populasi ayam pedaging sebanyak 14.947.100 ekor sementara populasi ayam ras pedaging pada tahun 2018 sebanyak 14.939.500 ekor, terjadi peningkatan sebanyak 619.400 ekor artinya terjadi peningkatan 4,14 %, hal ini disebabkan karena pola kemitraan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa menaikkan tingkat perekonomian khususnya peternak ayam pedaging. Iklim dan geografis daerah sangat mendukung untuk pengembangan usaha peternakan ayam ras pedaging di Lima Puluh Kota yang diiringi dengan SDM nya dan modal berasal dari pihak ketiga. Capaian kinerja indikator jumlah ayam pedaging pada tahun 2018 masuk kategori **sangat tinggi**.

Jumlah Ayam Pedaging dibanding tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang tertarik dengan pola kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan inti karena masyarakat atau peternak merasa nyaman karena serapan pemasaran sudah ditampung oleh perusahaan inti dengan dijelaskan dengan MoU, sementara peternak juga mendapat kemudahan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal untuk permodalan sehingga peternak dengan komoditi ayam pedaging meningkat yang

menyebabkan populasi atau jumlah ayam pedaging meningkat dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.5. Kandang Ayam Pedaging (Broiler)

Indikator kinerja Persentase peningkatan populasi ternak yang berkualitas yang terdiri dari Populasi sapi potong, Ayam ras petelur dan populasi ayam ras pedaging mengalami peningkatan sebanyak 10,53 % atau meningkat sebesar 110,54 % (dirata-ratakan) hal ini peningkatan populasi masuk kategori **sangat tinggi**.

**Peningkatan produksi ternak yang berkualitas** juga merupakan indikator pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Komoditi	Populasi Th 2017	Populasi Th 2018	Ket.
1.	Produksi Telur	48.830.567	58.978.952	
2.	Produksi Daging	1.120.944	1.053.184	
3.	Produksi Susu	186.198	194.325	



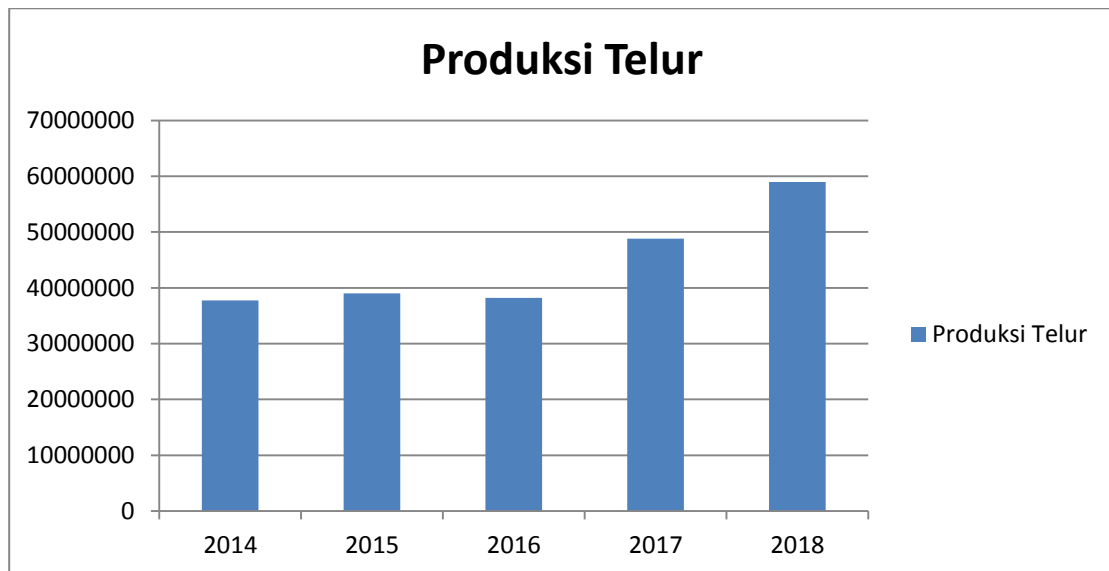
**a. Jumlah Produksi Telur**

Dari data statistik Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 dan dari tabel grafik dibawah bahwa produksi telur pada tahun 2017 yaitu sebanyak 48.830.567 kg sedangkan pada tahun 2018 jumlah produksi telur sebanyak 58.978.952 kg, terjadi peningkatan produksi telur sebanyak 20,78 % hal ini erat kaitannya dengan harga telur ayam ras sangat bagus di pasaran, sehingga peternak menambah populasi ayam ras petelur. Jumlah produksi telur sebagaimana disebutkan di atas diperoleh hanya dari jenis ternak ayam ras dengan catatan 1 kg telur ayam ras = 16 butir. Capaian kinerja indikator jumlah produksi telur pada tahun 2018 masuk kategori **sangat tinggi**.

Jumlah Produksi telur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat sebanyak 20,78 % hal ini disebabkan karena peternak dengan populasi besar atau skala besar tambah berkembang dalam usahanya dimana pola peternak skala besar tersebut lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan pemanfaatan tenaga kerja sehingga usahanya makin berkembang yang disertai dengan peningkatan populasi ternak ayam ras sehingga produksi telur pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.



Gambar 3.6. Produksi Telur Ayam Ras



Gambar 3.7. Jumlah Produksi Telur Ayam Ras Tahun 2014-2018

#### **b. Jumlah Produksi daging**

Produksi daging sapi pada tahun 2017 sebesar 1.120.949 kg dibandingkan dengan produksi daging sapi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.053.184 kg, pada tahun 2018 mengalami penurunan produksi daging sapi sebesar 67.756 kg atau penurunan sebesar 6,045 %. Jumlah produksi daging sapi sangat dipengaruhi oleh pemotongan ternak, semakin tinggi tingkat pemotongan maka semakin tinggi jumlah produksi daging. Di tahun 2018 ini jumlah pemotongan menurun atau berkurang sehubungan dengan jumlah pemotongan hewan kurban juga mengalami penurunan disebabkan masalah ekonomi dan adanya aturan pelarangan betina produktif juga sedikit mempengaruhi jumlah pemotongan.

#### **c. Produksi Susu**

Produksi telur pada tahun 2017 186.198 liter sementara produksi susu pada tahun 2018 sebanyak 194.325 liter, maka produksi susu dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 8.127 liter atau mengalami peningkatan sebesar 4,36 %. Peningkatan susu berbanding lurus dengan peningkatan populasi ternak betina dan pemasaran yang berkembang.

Indikator kinerja Persentase peningkatan produksi ternak yang berkualitas yang terdiri dari produksi daging, produksi telur dan produksi daging mengalami peningkatan sebanyak 6,36 % atau meningkat sebesar 106,36 % (dirata-ratakan) hal ini peningkatan produksi masuk kategori **sangat tinggi**.

3. SASARAN STRATEGI 3 : “**Meningkatnya Pemasaran Produk Peternakan**”

• **INDIKATOR UTAMA :**

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Prediket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pemasaran Produk Peternakan	Persentase peningkatan Jumlah produk peternakan yang dipasarkan	2 %	2 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan Jenis produk peternakan yang dipasarkan	2 %	2 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase kegiatan promosi produk peternakan	2 %	2 %	100 %	Sangat Tinggi

Jumlah produk peternakan yang dipasarkan juga merupakan penunjang untuk meningkatkan pendapatan peternak pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya.

**Data Produk Olahan Hasil Peternakan**

No.	Jenis Produk	Jumlah Produksi Tahun 2017	Jumlah Produksi Tahun 2018	Ket
1.	Rendang Telur	4.460 Kg	28.800 kg	
2.	Rendang Paru	395 Kg	395 Kg	
3.	Rendang Runtiah	345 Kg	345 Kg	
5.	Dadiah	1.200 tabung	1.200 tabung	
6.	Kikil	6.500 Kg	6.500 Kg	
7.	Kerupuk Jangek	450 Kg	2.030 kg	
8.	Dendeng Kering	40 Kg	40 Kg	
9.	Tome & Food (Feed Burger)	1.080 Kg	1.080 Kg	

Dari tabel diatas jumlah produksi produk olahan peternakan yang mengalami peningkatan pada produksi rendang telur dan kerupuk jangek, sementara pada komoditi lainnya produksi produk olahan tersebut tetap. Produk peternakan rendang telur mengalami penambahan produksi sebanyak 24.340 kg atau meningkat sebesar lebih kurang 5 kali lipat, sementara kerupuk jangek mengalami peningkatan produksi sebanyak 1.580 kg atau meningkat 3 kali lipat.

Jenis Produk peternakan juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan OPD.

Indikator Kinerja Persentase Jumlah Produksi produk peternakan mengalami peningkatan (dirata-ratakan) melebihi target sehingga masuk kategori **Sangat tinggi**.

#### **Data Jenis Produk Olahan Hasil Peternakan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Jumlah Produksi Tahun 2017</b>	<b>Jumlah Produksi Tahun 2018</b>	<b>Ket</b>
1.	Rendang Telur	20 pelaku usaha	21 pelaku usaha	
2.	Rendang Paru	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	
3.	Rendang Runtiah	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	
4.	Susu	6 kelompok	8 kelompok	
5.	Dadiah	5 kelompok	6 kelompok	
6.	Kikil	4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	
7.	Kerupuk Jangek	4 pelaku usaha	5 pelaku usaha	
8.	Dendeng Kering	1 pelaku usaha	1 pelaku usaha	
9.	Tome & Food (Feed Burger)	1 pelaku usaha	1 pelaku usaha	
10.	Bakso	-	1 pelaku usaha	
11.	RPU	-	1 unit	

Dari tabel atau data diatas terjadi peningkatan 18 %, lebih tinggi dari jenis produk peternakan yang ditargetkan sebanyak 2 %, dengan demikian terjadi peningkatan dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Selanjutnya promosi produk peternakan baik telur, susu, daging beserta olahannya dan juga promosi ternak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan melalui berbagai even baik didalam daerah tingkat Kabupaten dan luar daerah tingkat provinsi serta tingkat nasional maupun internasional. Pada

tahun 2018 salah satu pelaku usaha olahan hasil peternakan yaitu KOKOCI telah mengikuti promosi ke Australia dan Turkey melalui pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh. Saat ini KOKOCI sedang mengurus izin untuk memasukkan produk ke kedua negara tersebut.

Adapun pengolahan hasil Tom Burger telah memasarkan produknya sampai ke Provinsi Jambi, Bengkulu dan Riau serta mendapat rekor MURI dalam Pengolahan Hasil tersebut.

RPU skala kecil yang berlokasi di Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk telah mulai beroperasi sejak awal tahun 2018 dan pemasaran sudah dapat diterima di Hotel Berbintang.

Adapun kegiatan Promosi berupa lomba ternak tingkat provinsi setiap tahunnya diikuti oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta acara pameran yang dilaksanakan ditingkat kabupaten juga setiap tahunnya diikuti oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Capaian kinerja indikator kegiatan promosi produk peternakan terlaksana 100 % dan pada beberapa komoditi atau kegiatan terjadi peningkatan, perkembangan dan kemajuan berarti pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini dengan kategori **Sangat Tinggi**.

B. Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terhadap pencapaian target kegiatan dan program.

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

D. Isu –isu penting dan prioritas yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2021

Adapun isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.
2. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah.

3. Peningkatan produksi hasil peternakan, hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak, Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
4. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

## **Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel **T-B.35** diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari pelayanan dinas, Renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan, dan peningkatan daya saing produk peternakan.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel T-B 35**.

**Tabel T-B.35****Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Belum optimalnya potensi daerah di bidang peternakan	Optimalisasi pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan penggunaan lahan di bidang peternakan
3.		Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan
4.		Cuaca dan musim yang ekstrim mengakibatkan fluktusasi produktivitas ternak dan ancaman penyakit menular	Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan
5.		Rendahnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewan yang ASUH	Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
6.		Tidak berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat	Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternakan besar dan kecil serta unggas



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7.		Fluktuasi harga ternak yang membuat usaha peternakan Rakyat mengalami pasang surut sehingga membuat minat masyarakat untuk beternak rendah	Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
8.		Ketersediaan potensi SDA, SDM dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak	Melaksanakan Bimtek
9.		Ancaman penyakit akibat tingginya tingkat lalu lintas ternak	Rendahnya pelayanan kesehatan ternak
10.		Mutu bibit yang masih rendah karena penerapan peraturan perbibitan belum sepenuhnya dilaksanakan	Regulasi
11.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan lahan peternakan dan alih fungsi lahan
12.		Tingginya alih fungsi lahan	
13.	Meningkatnya daya saing produk	Keterbatasan bahan baku yang berkualitas	Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku
			Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDM maupun administrasi kelompok
14	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS	Pendistribusian ternak ke peternak / kelompok ternak	Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok tani ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang

			beranggapan Bansos dan Hibah tersebut sebagai bantuan lepas
--	--	--	---

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik dengan 1 urusan, yakni urusan pilihan pertanian dengan 4 bidang yakni Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pengolah hasil, Bidang Prasarana dan sarana serta Bidang Penyuluhan. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sesuai tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak :

- a. Masih tingginya pemotongan sapi /kerbau betina produktif
- b. Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan oleh kelompok/swasta maupun aparatur dinas
- c. Belum optimalnya penyebaran sapi pada masyarakat
- d. Belum optimalnya pelaksanaan IB (Inseminasi buatan)
- e. Belum optimalnya pengawasan mutu bibit dan pakan yang beredar.

2. Permasalahan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Belum tersedianya pos lalu lintas ternak didaerah perbatasan dengan provinsi tetangga.
- b. Belum tersedianya rumah potong hewan yang representatif
- c. Masih tingginya kasus rabies dan penyakit menular
- d. Masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak sapi.
- e. Masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan ke masyarakat.
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah nagari dalam mendukung pemberantasan rabies dan penyakit menular ternak.
- g. Belum optimalnya pengelolaan produk olahan hasil peternakan
- h. Belum tersedianya los daging higienis

3. Permasalahan bidang Prasaranan dan sarana

- a. Masih rendahnya pengetahuan peternak dalam pengolahan pakan

- alternatif dengan sumber limbah pertanian.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan modal bantuan sosial oleh kelompok penerima.
  - c. Belum terlaksananya tugas dan fungsi kasi lahan dan irigasi dalam pemetaan lahan karena belum tersedianya rekening anggaran pendukung.
  - d. Belum tersedianya los daging higienis
4. Permasalahan pada urusan Penyuluhan
- a. Belum tersedianya buku pintar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga peneliti untuk penerapan temuan teknologi
  - c. Belum optimalnya sinergitas kelembagaan dalam pemberdayaan peternak.

#### **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah *“terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis **“YANG MANTAP”** Berlandaskan Iman dan Taqwa”*.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Sehubungan dengan visi, misi kepala daerah dan sasaran RPJMD maka permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

**Tabel 35.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota**

<b>No.</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah	Kualitas Bibit	Keterbatasan bibit yang berkualitas	Tingginya permintaan bibit mendorong dinas Peternakan Prov untuk menyusun regulasi
2		Rendahnya produksi pangan asal ternak	Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan	Pemenuhan tenaga lapangan sesuai dengan persyaratan teknis dan peningkatan kapasitasnya
		Tingginya harga kosentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak kepada produktifitas ternak	Tingginya harga kosentrat dan ketergantungan terhadap bahan baku impor	Regulasi penyediaan bahan baku pakan ternak
		Rendahnya pelayanan kesehatan ternak dan hewan	Menurunnya status kesehatan ternak	Kapasitas petugas dan sarana dan prasarana yang memadai
		Keterbatasan sarana dan	Rendahnya	SDM Peternak untuk

		prasarana serta teknologi terapan untuk mendukung produk peternakan	SDM peternak	memanfaatkan teknologi yang ada
		Lemahnya kapasitas kelembagaan peternak dan penyuluh	Keterbatasan jumlah dan tenaga penyuluh serta kurangnya bimtek untuk kelompok ternak	Peningkatan kapasitas pemnyuluh, peternak dan kelembagaan

Sehubungan dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tugas dan fungsi (sesuai dengan program dan kegiatan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengannya, sebagaimana tabel dibawah ini :

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Misi pada RPJM</b>	<b>Ket</b>
<p><b>I. Program Pelayanan administrasi perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Penyediaan Alat Tulis</li> <li>6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan</li> <li>7. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah</li> </ol>	<p>Mewujudkan reformasi birokrasi seutuhnya dan Jaminan Penjenjangan Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan pekerja sosial masyarakat</p>	
<p><b>II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</b></p>	<p>Sda</p>	

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>2. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</li> <li>3. Pengadaan mobil jabatan</li> </ol>		
<p><b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.</li> <li>2. Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu</li> </ol>	Sda	
<p><b>IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan formal</li> </ol>	Sda	
<p><b>V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> </ol>	Sda	
<p><b>VI. Program peningkatan kesejahteraan petani</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan lembaga petani</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>	

	<p>Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jumbo, Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.</p>	
<p><b>VIII. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan masalah</li> <li>2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</li> <li>3. Pemusnahan tenak yang terjangkit endemik</li> <li>4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, mesjid, MDA, TPA/TPSA dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka mengharumkan nama daerah.</p> <p>Peningkatan pelayanan publik dan</p>	

	<p>Penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</p>	
<p><b>IX. Program peningkatan produksi hasil peternakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak</li> <li>2. Pembibitan dan perawatan ternak</li> <li>3. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat</li> <li>4. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak</li> <li>5. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan,Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi,Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan,Gerakan Sayang Jumpo.Bank Tanah Nagari,Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.</p>	
<p><b>X. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b></p>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah,</p>	



1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan
2. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/ internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer	serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan.	
4. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan	Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi
5. Pemeliharaan rutin/berkala pusat pusat etalase / eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan	Kerakyatan,Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi,Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Gerakan Usaha Dini Mandiri,
6. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	serta gerakan Pemberdayaan Perempuan,Gerakan Sayang Jumo.Bank Tanah Nagari,Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.
7. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Peningkatan pelayanan publik dan Penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
8. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	
9. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	
10. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	
11. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	
12. Monitoring,evaluasi dan pelaporan	

<p><b>XI. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b></p> <p>1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna</p>	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>	
---	--	--

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.3 sebagai berikut :

**Tabel T-C.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

lembar ...  
dari....

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pilihan					Urusan Pilihan					
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<i>Tingkat kelancaran administrasi perkantoran</i>			<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>Tingkat kelancaran administrasi perkantoran</i>		0	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Disnak & Keswan	Tersedianyan jasa surat menyurat berupa :	12 bulan	11.342.700	Penyediaan jasa surat menyurat	Disnak & Keswan	Tersedianyan jasa surat menyurat berupa :	12 bulan	11.342.700	
			Materai 6000 dan 3000					Materai 6000 dan 3000			
			Amplop					Amplop			
			Lembar Disposisi					Lembar Disposisi			
			Jasa Pengiriman					Jasa Pengiriman			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnak & Keswan dan UPT	Terbiayainya rekening telepon, koran, listrik,air dan internet dinas dan UPT	12 bulan	90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnak & Keswan dan UPT	Terbiayainya rekening telepon, koran, listrik,air dan internet dinas dan UPT	12 bulan	90.000.000	

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnak & Keswan	Tersedianya honorarium aparatur dinas	12 bulan	211.440.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnak & Keswan	Tersedianya honorarium aparatur dinas	12 bulan	211.440.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedia alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	12 bulan	25.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedia alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	12 bulan	25.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	12 bulan	55.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	12 bulan	55.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnak & Keswan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas	12 bulan	41.501.680	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnak & Keswan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas	12 bulan	41.501.680	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnak & Keswan	Terwujudnya kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kenyamanan tempat kerja	1 paket	70.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnak & Keswan	Terwujudnya kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kenyamanan tempat kerja	1 paket	70.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnak & Keswan	Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan	12 bulan	4.800.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnak & Keswan	Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan	12 bulan	4.800.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Disnak & Keswan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	50.525.000	Penyediaan makanan dan minuman	Disnak & Keswan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	50.525.000	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disnak & Keswan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas dan UPT serta melaksanakan konsultasi	12 bulan	176.770.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disnak & Keswan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas dan UPT serta melaksanakan konsultasi	12 bulan	176.770.000	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Disnak & Keswan	Lancarnya kegiatan dinas dan operasional dinas	1 unit	400.000.000	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Disnak & Keswan	Lancarnya kegiatan dinas dan operasional dinas	1 unit	400.000.000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disnak & Keswan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		250.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disnak & Keswan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		250.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disnak & Keswan	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	12 bulan	200.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disnak & Keswan	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	12 bulan	200.000.000	
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disnak & Keswan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu	86 stel	43.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disnak & Keswan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu	86 stel	43.000.000	

	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>					<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					
	Pendidikan dan pelatihan formal	Disnak & Keswan	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	12 bulan	35.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Disnak & Keswan	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	12 bulan	35.000.000	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnak & Keswan	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicetak dan digandakan	12 bulan	36.072.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnak & Keswan	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicetak dan digandakan	12 bulan	36.072.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disnak & Keswan	Tersedianya laporan keuangan dan LKPJ	12 bulan	1.248.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disnak & Keswan	Tersedianya laporan keuangan dan LKPJ	12 bulan	1.248.000	
	<b>Urusan Pangan</b>					<b>Urusan Pangan</b>					
	<b>Program peningkatan kesejahteraan petani</b>					<b>Program peningkatan kesejahteraan petani</b>					

	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani yang bergerak di bidang peternakan	50 Kelompok	50.000.000	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani yang bergerak di bidang peternakan	Pembinaan kelompok sebanyak 30 kelompok	50.000.000	
			Terlaksananya seleksi penilaian CP/CL sebagai kelompok tani penerima bantuan	50 Kelompok				Terlaksananya seleksi penilaian CP/CL sebagai kelompok tani penerima bantuan			
			Terlaksananya penilaian kelas kelompok tani yang bergerak di sector peternakan	22 Kelompok				Terlaksananya penilaian kelas kelompok tani yang bergerak di sector peternakan			
			Terbitnya sertifikat peningkatan kelas kelompok yang bergerak di sector peternakan	50 Kelompok				Terbitnya sertifikat peningkatan kelas kelompok yang bergerak di sector peternakan			
	<b>Urusan Pertanian</b>					<b>Urusan Pertanian</b>					
	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan</b>					<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan</b>					

	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH)	Peningkatan sumber daya penyuluh pertanian/pe ternakan lapangan	100.000.000	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH)	Peningkatan sumber daya penyuluh pertanian/pe ternakan lapangan	100.000.000	
			Terlaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat					Terlaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat			
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh					Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh			
	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>					<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>					
	<b>Pendataan masalah peternakan</b>				42.000.000	<b>Pendataan masalah peternakan</b>			158.000	42.000.000	



		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pendataan peternakan dan kesehatan hewan	4.056 kali, 26 petugas, 13 kecamatan			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pendataan peternakan dan kesehatan hewan	4.056 kali, 26 petugas, 13 kecamatan		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat Hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar	40 kali, 20 toko obat hewan, 13 kecamatan			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat Hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar	40 kali, 20 toko obat hewan, 13 kecamatan		
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya buku tentang data peternakan	1 Buku			Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya buku tentang data peternakan	1 Buku		
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya buku tentang gambaran penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan	1 Buku			Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya buku tentang gambaran penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan	1 Buku		
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya data fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Buku			Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya data fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Buku		
	<b>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</b>				35.332.450	<b>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</b>				35.332.450	
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Vaksinasi Rabies	50.00 dosis			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Vaksinasi Rabies	50.00 dosis		

		Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	Terlaksananya Vaksinasi SE	5.000 dosis			Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	Terlaksananya Vaksinasi SE	5.000 dosis		
		Pangkalan dan Kapur IX	Terlaksananya vaksinasi jembrana	1.500 Dosis			Pangkalan dan Kapur IX	Terlaksananya vaksinasi jembrana	1.500 Dosis		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit hewan menular (PHM)	200 sampel			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit hewan menular (PHM)	200 sampel		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi	1.500 ekor			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi	1.500 ekor		
		6 (UPT I - UPT VI)	Terlaksananya penanggulangan kasus gigitan HPR	Observasi HPR 150 ekor			6 (UPT I - UPT VI)	Terlaksananya penanggulan n kasus gigitan HPR	Observasi HPR 150 ekor		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	25 kali			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	25 kali		
			Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini	40 Kali				Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini	40 Kali		
			Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan hewan	1.500 ekor				Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan	1.500 ekor		

								hewan			
			Peningkatan SDM petugas pelayanan keswan dan kesmavet	2 kali, 30 petugas				Peningkatan SDM petugas pelayanan keswan dan kesmavet	2 kali, 30 petugas		
	<b>Pemusnahan ternak yang terjangkau penyakit endemik</b>					<b>Pemusnahan ternak yang terjangkau penyakit endemik</b>					
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkau penyakit menular Rabies dan AI	50 ekor HPR dan 1.500 ekor AI	14.429.200		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkau penyakit menular Rabies dan AI	50 ekor HPR dan 1.500 ekor AI	14.429.200	
	<b>Pengawasan perdagangan ternak antar daerah</b>				<b>46.360.250</b>	<b>Pengawasan perdagangan ternak antar daerah</b>				<b>46.360.250</b>	
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	499 kali			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	499 kali		
		Kab. Lima Puluh Kota	Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	400 sampel			Kab. Lima Puluh Kota	Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	400 sampel		

		Kab. Lima Puluh Kota	Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, susu, telur dan olahannya)	138 kali			Kab. Lima Puluh Kota	Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, susu, telur dan olahannya)	138 kali		
		Kab. Lima Puluh Kota	Pembinaan Farm (Peternakan Ayam Komersil) untuk NKV	5 farm(Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuah LN, Harau dan Luak)			Kab. Lima Puluh Kota	Pembinaan Farm (Peternakan Ayam Komersil) untuk NKV	5 farm(Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuah LN, Harau dan Luak)		
	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	7.831.200	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	7.831.200	
	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>					<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>					
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak</b>				<b>238.480.00</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak</b>				<b>238.480.00</b>	
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan	- Frozen Semen (sapi 9.000 dosis, kerbau 1.000 dosis)			Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan	- Frozen Semen (sapi 9.000 dosis, kerbau 1.000 dosis)		
				- N2 Cair (3.000 liter)					- N2 Cair (3.000 liter)		
				- P. Sheet (250 pak)					- P. Sheet (250 pak)		
				- P. Glove (125 pak)					- P. Glove (125 pak)		

				- Tissue 100 gulung)					- Tissue 100 gulung)		
				- Alkohol (50 liter)					- Alkohol (50 liter)		
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya kegiatan IB	- IB 10.000 dosis			Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya kegiatan IB dan TE	- IB 10.000 dosis		
	<b>Pembibitan dan Perawatan Ternak</b>				<b>25.000.000</b>	<b>Pembibitan dan Perawatan Ternak</b>				<b>25.000.000</b>	
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di Inseminasi Buatan	- 600 ekor			Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di Inseminasi Buatan	- 600 ekor		
			Terlaksananya pendataan kelahiran ternak yang sudah di inseminasi buatan	300 Ekor				Terlaksananya pendataan kelahiran ternak yang sudah di inseminasi buatan	300 Ekor		
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Bimtek Pengembangan ternak unggas	30 orang			Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Bimtek Pengembangan ternak unggas	30 orang		
			Leaflet Good Farming Practice (Ruminasi dan Non Ruminasia)	2 Leaflet				Leaflet Good Farming Practice (Ruminasi dan Non Ruminasia)	2 Leaflet		
	<b>Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat</b>				<b>719.011.000</b>	<b>Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat</b>				<b>719.011.000</b>	<b>0</b>

		kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL	Terlaksananya pengadaan ternak sapi dan pendistribusiannya untuk kepada masyarakat	75 Ekor, 7 Kelompok			kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL	Terlaksananya pengadaan ternak sapi dan pendistribusiannya untuk kepada masyarakat	75 Ekor, 7 Kelompok		
		kelompok-kelompok tani	Terlaksananya study komperatif pengembangan ternak sapi unggul untuk petugas dan kelompok ternak	21 orang			kelompok-kelompok tani	Terlaksananya study komperatif pengembangan ternak sapi unggul untuk petugas dan kelompok ternak	21 orang		
	<b>Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak</b>				<b>42.647.900</b>	<b>Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak</b>				<b>42.647.900</b>	
			Terlaksananya kegiatan percontohan penerapan pemberian pakan konsentrat untuk sapi potong pada kelompok tani ternak	5 kelompok.25 ekor				Terlaksananya kegiatan percontohan penerapan pemberian pakan konsentrat untuk sapi potong pada kelompok tani ternak	5 kelompok.25 ekor		
			Terlaksananya pengujian sampel pakan ternak	30 sampel				Terlaksananya pengujian sampel pakan ternak	30 sampel		
			Terlaksananya Bimtek tentang pakan ternak untuk kelompok tani	4 kelompok, 80 orang				Terlaksananya Bimtek tentang pakan ternak untuk kelompok tani	4 kelompok, 80 orang		

		Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya bahan penyuluhan (buku tentang pakan ternak)	10 buku			Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya bahan penyuluhan (buku tentang pakan ternak)	10 buku		
			Terlaksananya percontohan/demplot kebun rumput	1 Ha			kelompok tani	Terlaksananya percontohan/demplot kebun rumput	1 Ha		
			Bimtek pengolahan pakan good feeding practice untuk pelaku ayam petelur	40 orang				Bimtek pengolahan pakan good feeding practice untuk pelaku ayam petelur	40 orang		
	<b>Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan Pakan ternak</b>				<b>38.115.750</b>	<b>Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan Pakan ternak</b>				<b>38.115.750</b>	
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin Rabies dan SE, Jembrana	SE 5.000 dan Jembrana 1.500 serta Rabies 50.000			Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin Rabies dan SE, Jembrana	SE 5.000 dan Jembrana 1.500 serta Rabies 50.000		
			Tersedianya obat-obatan dan bahan kimia dalam pelayanan keswan	6.000 dosis obat-obatan dan 3.100 dosis bahan kima				Tersedianya obat-obatan dan bahan kimia dalam pelayanan keswan	6.000 dosis obat-obatan dan 3.100 dosis bahan kima		
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya prasana dan prasarana untuk Vaksinasi, Eliminasi dan Surveillance	1 paket			Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya prasana dan prasarana untuk Vaksinasi, Eliminasi dan Surveillance	1 paket		
	<b>Pengembangan Agribisnis Peternakan</b>				<b>33.215.220</b>	<b>Pengembangan Agribisnis</b>				<b>33.215.220</b>	

						<b>Peternakan</b>					
		Kab. Lima Puluh Kota	Terigistrasinya kandang ternak besar dan unggas	300 kandang			Kab. Lima Puluh Kota	Terigistrasinya kandang ternak besar dan unggas	300 kandang		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya bimtek untuk pelaku pengolah hasil produk peternakan	40 pelaku usaha			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya bimtek untuk pelaku pengolah hasil produk peternakan	40 pelaku usaha		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya fasilitasi pembahsan RAnperda Izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	2 kali			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya fasilitasi pembahsan RAnperda Izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	2 kali		
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	1 Kali			Kab. Lima Puluh Kota	Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	1 Kali		
			Leaflet untuk izin usaha peternakan dan keswan, leaflet AUTS/K dan permodalan (KUR & Kemitraan)	3 Leaflet				Leaflet untuk izin usaha peternakan dan keswan, leaflet AUTS/K dan permodalan (KUR & Kemitraan)	3 Leaflet		
	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	323 Kali	10.010.400	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	10.010.400	
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>					<b>Program Peningkatan Pemasaran</b>					



						<b>Hasil Produksi Peternakan</b>					
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	1 unit	114.028.000	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	1 unit	114.028.000	
	<b>Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	1 unit	<b>34.128.950</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	1 unit	<b>34.128.950</b>	
		Pasar Ternak Limbanang	Terpelihara/terawat fasilitas/asset yang ada dilokasi pasar ternak	1 Unit			Pasar Ternak Limbanang	Terpelihara/terawat fasilitas/asset yang ada dilokasi pasar ternak	1 Unit		
	<b>Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah</b>				<b>89.324.700</b>	<b>Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah</b>				<b>89.324.700</b>	
		Kabupaten lain, IKK Sarilamak	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	2 kali pameran			Kabupaten lain, IKK Sarilamak	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	2 kali pameran		

		Kab. Lima Puluh Kota	Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui Expo Peternakan tingkat provinsi sumatera barat	Lomba Ternak Tingkat Provinsi			Kab. Lima Puluh Kota	Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui Expo Peternakan tingkat provinsi sumatera barat	Lomba Ternak Tingkat Provinsi		
	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	60 Kali	3.636.000	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	3.636.000	
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>					<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>					
	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna</b>				213.552.050	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna</b>				213.552.050	
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan alsinnak - mesin chopper penghancur kompos - mesin chopper pengolah pakan - kendaraan bermotor roda tiga	3 unit			Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan alsinnak - mesin chopper penghancur kompos - mesin chopper pengolah pakan - kendaraan bermotor roda tiga	3 unit		
	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program	50 kota	9.825.600	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	9.825.600	

			peningkatan penerapan teknologi peternakan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2020 serta mempertimbangkan kegiatan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan bagi masyarakat umumnya akan menjadi perhatian serius Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Adapun program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi maupun pemerintah nagari yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang nagari dan kecamatan. Kesemuanya itu ditampilkan pada Tabel C.4 yang berisikan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021.

**Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	3	4	6	7	10
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan Pengurus Kelompok Pertanian	Indobaleh Barat	1800 Orang	Tidak sesuai Program dan kegiatan
2	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan Pengurus Kelompok Peternakan	Indobaleh Barat	100 Orang	Tidak sesuai Program dan kegiatan
3	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Pelatihan pengolahan pakan ternak	Jorong Menara Agung, Jorong Beringin Indah, Jorong Simpang Ganti, Jorong Koto ramai, jorong Koto Baru	35 Orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Peningkatan Kemampuan lembaga Petani	Nagari Simalanggang	100 Orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
5	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Nagari Koto tengah Simalanggang	1 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan ternak sapi	Nagari Koto tengah Simalanggang	100 ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan induk sapi untuk masyarakat	Nagari Pilubang	20 Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
8	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	bantuan ternak sapi	Nagari Harau	20 Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Pembuatan makanan ternak	Nagari Solok Bio-bio	2 Kegiatan	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan peningkatan kemampuan lembaga petani	Nagari Harau	180 orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
11	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan 2 unit Betor untuk Bank sampah Sasupi Tujuh Koto Talago	Jorong Padang Kandi	2 Unit	Tidak sesuai Program dan kegiatan
12	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	sosialisasi pengolahan/pembuatan pakan untuk kelompok tani ternak	Kantor Wali Nagari	1 kegiatan	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
13	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Kantor Wali Nagari Guguak VIII Koto	1 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
14	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi	Nagari Kubang	20 ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
15	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi kepada seluruh masyarakat Nagari Simpang Sugiran	Nagari simpang Sugiran	10 ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan

16	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pemberian bantuan Mesin Choper pengahncur compos	Nagari simpang Sugiran	10 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
17	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan teknologi Tepat Guna untuk masyarakat Nagari Simpang Sugiran	Nagari simpang Sugiran	30 Orang	Tidak sesuai Program dan kegiatan
18	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi	Nagari Sungai Talang		Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan pertanian	Nagari Tanjung Pauh	40 Orang	Tidak sesuai Program dan kegiatan
20	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak Sapi	Nagari Gunuang Malintang	20 Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
21	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan bantuan Motor roda tiga (Betor) Nagari Gunuang Malintang	Nagari Gunuang Malintang	1 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan



22	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan mesin Chopper penghancur kompos Nagari Gunuang Malintang	Nagari Gunuang Malintang	1 unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
23	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak	Bantuan pakan konsentrat untuk sapi induk	Nagari Mungka	50 Ekor	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan motor roda tiga (Bentor)	Nagari Mungka	5 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
25	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak Sapi	Nagari Jopang Manganti	15 Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
26	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan Mesin Choper penghancur Kompos	Nagari Jopang Manganti	3 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
27	Program peningkatan penerapan teknologi	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi	Bantuan motor roda tiga	Nagari Jopang Manganti	3 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan

	peternakan	peternakan tepat guna				
28	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan bagi petani dan kelompok tani	Jorong Kampung Tengah	30 Orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
29	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Sosialisasi pemotongan hewan qurban yang baik dan benar	Nagari Sungai Antuan	20 orang/hari	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
30	Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bentor sampah	Jorong Kociak	3 Unit	Tidak sesuai Program dan kegiatan
31	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan Bentor roda tiga	Jorong Tengah Situjuah Batua	5 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
32	Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Jorong Tengah Situjuah Batua	2 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan

33	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Sosialisasi/bimtek pemotongan hewan qurban yang baik dan benar	Jorong Tengah Situjuah Batua	55 orang/hari	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
34	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi	Jorong Bumbang	20 ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
35	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi	Jorong Bumbang	13 ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
36	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor Keltan Subur Halaban	Padang tengah, Lambuk, Air Babar Lompek, Alang Laweh	1 Unit	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
37	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Pelatihan pembuatan pakan ternak	Nagari Labuah Gunuag	14 Kegiatan	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

38	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak Kharisma Mandiri	Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	Kelompok belum teregistrasi di Disnakkeswan
39	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak Angin Berembus	Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	Kelompok belum teregistrasi di Disnakkeswan
40	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak Serumpun	Jrg Ambacang Kunyik Nag. Pauh sangik	1 Paket	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
41	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak Kuban sejahtera	Jrg koto Baru Nag. Kubang	1 Paket	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
42	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor Keltan Senada	Nag. Batu Payuang	2 Unit	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

43	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak Simpang Tigo	Jrg Tiga Alur Nag. Batu Balang	10 Ekor	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
44	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak Maimbau	Jrg Balai Nag. Batu Balang	10 Ekor	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
45	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor Keltan Daladang	Nag. Batu Payuang	1 Unit	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
46	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok tani Burai Indah	Jrg Koto Tuo Nag. Mungka	1 Paket	Kelompok belum teregistrasi di Disnakkeswan
47	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak Amanah	Nagari Gurun	1 Paket	Kelompok belum teregistrasi di Disnakkeswan

48	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi a.n Kelompok Ternak sepakat Bersama	Nagari Simalanggang	2 Paket	Kelompok belum teregistrasi di Disnakkeswan
49	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor	Kec. LSH, Kec. Luak, dan Kec. Situjuh Limo Nagari	5 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
50	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Simental F1 umur 18 s/d 36 Bulan	Kec. LSH, Kec. Luak, dan Kec. Situjuh Limo Nagari	30 Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
51	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Kegiatan sosilaisasi pemotongan hewan dan penyediaan pangan asal hewan yang aman sehat utuh dan halal	Kec. LSH, Kec. Luak, dan Kec. Situjuh Limo Nagari	60 Orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
52	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Kegiatan sosilaisasi pemotongan hewan dan penyediaan pangan asal hewan yang aman sehat utuh dan halal	Kec. LSH, Kec. Luak, dan Kec. Situjuh Limo Nagari	60 Orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

53	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Pelatihan kelompok tani ternak	Kec. LSH, Kec. Luak, dan Kec. Situjuh Limo Nagari	60 Orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
54	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak sapi untuk kelompok	Nagari Sarilamak	Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
55	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi	Nagari Batu Balang	2 Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
56	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi	Nagari Pandam Gadang	Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
57	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor	Kec. Gunung Omeh dan Kec Suliki	4 Unit	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
58	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi	Nagari Lubuak Alai	Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan

59	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi	Kec. LSH dan Kec Luak	Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
60	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Sapi untuk kelompok ternak Ampang Gadang Tujuh Koto Talago	Kec. Guguak	Ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
61	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Talago Dadok	Jrg Tabiang Nag. Sungai Kamuyang		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
62	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Ambacang Permai	Jrg Koto Malintang Nag. Batu Payuang		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
63	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Padi Sarumpun	Jrg Lareh Nan Panjang Nag. Batu Payuang		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan



64	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor untuk kelompok Sinar Mata Air	Nag. Batu Payuang		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
65	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor untuk kelompok Tiga sejoli	Nag. Batu Payuang		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
66	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor untuk kelompok Harmonis	Jrg Kaplo Bukik Nag. Batu Payuang		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
67	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor untuk kelompok Maju Jaya	Jrg Kaplo Bukik Nag. Batu Payuang		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
68	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor untuk kelompok Makmur	Jrg Koto Malintang Nag. Batu Payuang		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

69	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor untuk kelompok senada	Jrg Pakan Rabaa Nag. Batu Payuang		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
70	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Bentor untuk kelompok Minang saiyo	Nag. Batu Payuang		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
71	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Ingin Maju Mudiak Liki	Nag. Kurai		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
72	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Boncah Rawang	Nag. Kurai		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
73	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Semoga Berkah Mudiak Liki	Nag. Kurai		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
74	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Semoga Berkah Banja Loweh Godang	Nag. Banja Loweh		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

75	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok makmur Banja Loweh Godang	Nag. Banja Loweh		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
76	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi kepada masyarakat	Nag. Muara Paiti Kec. Kapur IX	10 ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
77	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Pengadaan sarana pengolahan pupuk organik			Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan
78	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian ternak sapi ke lompok tani remaja mandiri	Nag. suayan		Kelompok belum teregistrasi di Disnakeswan
79	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok Tani Usaha Bunda	Jorong suayan Randah Nag. suayan		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
80	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi untuk kelompok KUP	Nag. Lubuak Batingkok		Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan
81	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Kegiatan sosialisasi pemotongan hewan Qurban yang baik dan	Kec. Pyk dan Harau	Orang	Akan Diverifikasi dan CPCL sesuai aturan

			benar			
82	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian Ternak sapi kepada masyarakat	Kec. LSH dan Kec Luak	ekor	Tidak ada nama kelompok calon penerima bantuan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Nasional tahun 2021 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan RKP tahun 2021, memuat tema RKP tahun 2021 adalah :

**“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”**

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan fakta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia;

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2021 ini antara lain :

1. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (**tusi**) harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Holistik, Tematik, Terintegrasi dan Spasial.

- **Holistik – Tematik.** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, Kemen KLH, Kemen Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

- **Integratif.** Pencapaian kedaulatan pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organic, pengendalian harga dan impor pangan dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- **Spasial.** Pembangunan sawah baru misalnya harus mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar dan lain-lain.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan



- koperasi, dan iklim n investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
  8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
  9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
  10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappeda mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat program-program kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBD Kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan disajikan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati/Walikota.

## **A. VISI DAN MISI**

### **Visi dan Misi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa datang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi organisasi dengan arah pembangunan yang akan dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran organisasi dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan organisasi dan setiap perangkatnya untuk berbuat demi kepentingan organisasi pemerintahan daerah menciptakan makna bagi masyarakat yang dilayani, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan yang ada sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi rencana strategis yang disusun harus lah sesuai dengan kaidah dan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah “*Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “**YANG MANTAP**” Berlandaskan Iman dan Taqwa*”.

Adapun penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi
2. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan
3. **Mantap** adalah akronim dari maju, amanah, bermartabat, dan berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
4. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang shaleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Adapun misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan dan berbasis masyarakat dengan pemanfaat potensi daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Memperkuat kelembagaan Nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan

Adapun data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

I. Populasi Ternak tahun 2015-2019

Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data populasi ternak berikut ini :

Tabel : Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kot Tahun 2015 - 2019

NO	JENIS TERNAK	Populasi Ternak/ekor					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sapi Potong	34.808	35.852	36.043	39.689	42.704	
2.	Sapi Perah	19	23	47	47	39	
3.	Kerbau	13.036	13.427	11.477	12.327	12.329	
4.	Kuda	80	84	75	82	95	
5.	Kambing	23.053	24.436	26.335	27.939	30.313	
6.	Ayam Buras	432.563	445.540	318.167	328.578	348.701	
7.	Ayam Ras Petelur	5.061.375	5.213.216	6.349.407	7.450.450	7.474.471	
8.	Ayam Ras Pedaging	5.445.233	5.608.590	14.947.100	19.116.500	16.468.528	
9.	Itik	186.934	192.318	121.568	132.088	139.756	
10.	Burung Puyuh	1.010.484	1.040.799	642.290	623.819	656.316	

## I. Produksi Telur 2015 - 2019

Produksi Telur Ternak Unggas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Ternak	Produksi Telur/kg				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ayam Buras	277.056	285.368	203.785,68	210.454,48	223.343
2.	Ayam Ras	39.023.201,3	40.193.897	48.830.567,97	57.319.609,5	57.418.459
3.	Itik	1.026.267,7	1.057.055	667.408,32	725.163,12	767.259
4.	Burung Puyuh	1.030.693,7	1.061.614	728.356,86	723.724,48	754.016

Ctt: 1 kg telur ayam buras= 25 butir, 1 kg telur ayam ras=16 butir

1 lkg itik = 15 butir

## II. Produksi Daging 2015-2019

Produksi Daging berdasarkan jenis ternak dari tahun 2015 s.d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Ternak	Produksi Daging/Susu(sapi perah)per kg				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sapi Potong	950.576,00	979.093	1.120.944	1.053.184	1.091.904
2.	Sapi Perah	29.070,00	29.970	0	0	0
3.	Kerbau	185.845,00	191.420	161.548	176.467,50	183.288
4.	Kambing	40.500,24	41.715	73.319,40	90.962,99	74.471
5.	Ayam Buras	526.797,60	542.601	384.393,87	397.514	422.327
6.	Ayam Ras Petelur	3.704.926,50	3.816.074	4.627.269,92	5.433.233	5.451.402
7.	Ayam Ras Pedaging	5.933.523,40	6.111.529	16.003.879,68	16.176.855	17.549.235
8.	Itik	109.917,20	113.215	71.481,98	77.668	82.176
9.	Burung Puyuh	100.037,90	103.038	62.008,65	60.134	62.698

I. Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 s.d 2018

Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013 s.d tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak per KK Tahun 2015-2018

NO	JENIS TERNAK	Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak per KK				
		2015	2016	2017	2018	Ket
1.	Sapi Potong	19.645	19.645	17.922	18.312	
2.	Sapi Perah	11	11	17	18	
3.	Kerbau	5.357	5.357	4.797	5.041	
4.	Kuda	43	43	44	46	
5.	Kambing	5.461	5.461	4.710	5.143	
6.	Ayam Buras	44.191	44.191	26.779	27.134	
7.	Ayam Ras Petelur	909	909	446	487	
8.	Ayam Ras Pedaging	764	764	513	550	
9.	Itik	6.526	6.526	3.980	4.335	
10.	Burung Puyuh	450	450	395	369	

### Misi

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan rumusan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja /upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam pencapaian visi adalah menyamakan dan mengerahkan semua energi/sumber daya untuk meningkatkan produksi peternakan. Setelah adanya kesamaan persepsi maka potensi keberhasilan pencapaian visi lebih besar, karena merupakan komitmen bersama dalam suatu organisasi.

## 1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

### 1. Tujuan

Bertolak dari misi yang ditetapkan di atas, maka **tujuan** yang ingin dicapai dan diwujudkan pada akhir pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

1. Meningkatnya produk peternakan yang berkualitas
2. Meningkatnya pendapatan Peternak

### Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Strategi
  1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
  2. Peningkatan produksi hasil peternakan



3. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
4. Peningkatan penerapan teknologi peternakan
5. Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan

b. Kebijakan

1. Pendataan masalah peternakan
2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan ternak
7. Pembiitan dan perawatan ternak
8. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
9. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
10. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
11. Pengembangan agribisnis peternakan
12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
15. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
16. Monev
17. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
18. Monev
19. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan

## **Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan**

Program pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program pembangunan peternakan disusun dengan mengacu kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun 2011 - 2015
4. Rencana Strategis Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015
5. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2015
6. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 – 2015

### **Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

**” Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ”Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”**

Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan taraf / kualitas hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri serta gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jompo. Bank Tanah Nagari, Usaha ekonomi Produktif pemuda.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, Mesjid, MDA, TPA/TPSA dan Pondok Pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka mengharumkan nama daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi seutuhnya dan Jaminan Penjejang Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat.
6. Peningkatan Pembangunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari,

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensial lokal.

7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribatan dan kerukunan antar umat beragama.
8. Mewujudkan keberadaan kota sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan infrastruktur dan perangkat lunak.
9. Menghadirkan pengakuan, penghargaan dan kompensasi terhadap kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah berbasis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak nagari mempunyai andil dan jasa di Republik ini. Mengembalikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, beragama maupun kedaulatan adat.

### **1.3 Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Adapun isu-isu penting yang ada di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh jajaran dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2. Keterbatasan penggunaan lahan dibidang peternakan
3. Kurangnya ketersediaan bahan baku pakan ternak, terutama jagung sehingga kabupaten Lima Puluh Kota masih membeli dari daerah tetangga.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
5. Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan.
6. Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas

- Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak
7. Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternak besar dan kecil serta anggaran.
  8. Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
  9. Melaksanakan Bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha peternakan dan produk olahan hasil peternakan
  10. Rendahnya pelayanan kesehatan hewan
  11. Regulasi perbibitan
  12. Keterbatasan lahan peternakandan alih fungsi lahan
  13. Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku
  14. Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDm maupun administrasi kelompok
  15. Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok tani ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang beranggapan Bansos dan dana hibah tersebut sebagai bantuan lepas.

Adapun program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang di RENSTRA adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Misi pada RPJM	Prog ke
<p><b><i>1. Program Pelayanan administrasi perkantoran</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> </ol>	<p>Mewujudkan reformasi birokrasi seutuhnya dan jaminan penjejaran karir dan kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan pekerja social masyarakat. <b>(misi 5)</b></p>	

<p>5. Penyediaan Alat Tulis</p> <p>6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan</p> <p>7. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah</p>		
<p><b>II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</b></p> <p>1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>2. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</p> <p>3. Pengadaan mobil jabatan</p>	Sda	
<p><b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b></p> <p>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.</p> <p>2. Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu</p>	Sda	
<p><b>IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b></p> <p>1. Pendidikan dan pelatihan formal</p>	Sda	
<p><b>V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b></p> <p>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p>	Sda	
<p><b>VI. Program peningkatan kesejahteraan petani</b></p> <p>1. Peningkatan kemampuan lembaga petani</p>	Meningktakan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas	1

	<p>unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <b>(misi 1)</b> dan Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui gerakan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, ketahanan energy, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM gerakan usaha dini mandiri serta gerakan pemberdayaan perempuan, gerakan sayang jompo. Bank tanah nagari, usaha ekonomi produktif pemuda. <b>(misi2)</b></p>	
<p><b>VII. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah</b></p> <p>1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah</p>	<p>Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan</p>	<p>Prog 1</p>

	<p>produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <b>(misi 1)</b></p>	
<p><b>VIII. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan masalah</li> <li>2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</li> <li>3. Pemusnahan tenak yang terjangkit endemik</li> <li>4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <b>(misi 1)</b> dan Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu serta meningkatkan pemberdayaan surau masjid, TPA/TPSA dan produk pesantren sebagai salah satu soko</p>	<p>Prog 3 dan 4</p>



	guru peningkatan sumberdaya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu berprestasi, atlet dan mereka yang mengharumkan nama daerah <b>(misi 3)</b> dan Peningkatan pelayanan public dan penciptan iklim investasi yang disukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) <b>(misi 4)</b>	
<p><b>IX. Program peningkatan produksi hasil peternakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak</li> <li>2. Pembibitan dan perawatan ternak</li> <li>3. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat</li> <li>4. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak</li> <li>5. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak</li> </ol>	Misi 1 dan Misi 2	Prog 2 dan Prog 3
<p><b>X. Program peningkatan pemasaran hasil</b></p>	Misi 1 dan misi 2	Prog 2,3 dan 4

<p style="text-align: center;"><b><i>produksi peternakan</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/ internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer</li> <li>3. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan.</li> <li>4. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan</li> <li>5. Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase /eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan</li> <li>6. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah</li> <li>7. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan</li> <li>8. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat</li> <li>9. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat</li> <li>10. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat</li> <li>11. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan</li> <li>12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ol>		
--	--	--

<b><i>XI. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</i></b> 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Misi 1	Prog 3
---	--------	--------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian sub sektor peternakan pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Program yang tertuang dalam belanja pokok (non urusan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

#### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Pokok :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan telepon
3. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perUU
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

*Output/Keluaran :*

1. Jumlah materai 3000, jumlah materai 6000, jumlah amplop dinas, jumlah blanko disposisi.
2. Pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet lingkungan lingkungan Disnak dan keswan.

3. Pembayaran administrasi keuangan
4. Pembelian alat dan bahan kebersihan untuk lingkungan Disnak dan Keswan.
5. Pembelian ATK untuk lingkungan Disnak & Keswan.
6. Pembelian barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan kelengkapan dan Disnak & Keswan.
7. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
8. Jumlah makan dan minum untuk rapat dan tamu
9. Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Jumlah pembelian bahan bacaan dan aturan perundan – undangan di kantor.
11. Jumlah kendaraan dinas / operasional
12. Jumlah pemeliharaan secara rutin / berkala kendaraan dinas
13. Jumlah gedung yang direhab
14. Jumlah pakaian dinas untuk aparatur
15. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
16. Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan diseluruh kecamatan, terlaksananya realisasi capaian kinerja dinas dan terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Program utama pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

### **Rencana Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak**

*Out put Kegiatan :*

1. Jumlah Frozen Semen
2. Jumlah N2 cair
3. Jumlah Alkohol
4. Jumlah Plastik Sheet
5. Jumlah Plastik Glove
6. Jumlah Tissue
7. Jumlah pelaksanaan kegiatan IB
8. Jumlah monev kegiatan IB

9. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat tentang perbibitan
10. Jumlah pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di IB
11. Jumlah kegiatan IB Jumlah pembinaan, monev tentang IB dan PKB
12. Jumlah pengadaan ternak dan pendistribusiannya untuk kelompok- kelompok tani

**Rencana Program Prioritas : Peningkatan Pemasaran Produk Peternakan**

1. Jumlah produk peternakan
2. Jenis produk peternakan
3. Jumlah promosi hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui bazar / pameran tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.
4. Pelaksanaan Pekan Nasional Petani
5. Jumlah peserta bimtek untuk meningkatkan pengetahuan peternak pelaku usaha pengolah hasil.
6. Jumlah pemberian rekomendasi usaha peternakan dan penguatan modal dari pemerintah.

**Rencana Program Prioritas : Peningkatan Status Kesehatan Hewan**

*Output / Keluaran*

1. Jumlah pendistribusian vaksin rabies, SE, Jembarana
2. Jumlah pembelian dan pendistribusian sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi, eliminasi dan survailance
3. Jumlah layanan kesehatan hewan
4. Jenis layanan kesehatan hewan

**Rencana Program Prioritas : Pengamanan Sumberdaya Hewani**

*Output / Keluaran*

1. Jumlah pengujian sampel bahan pangan asal hewan

2. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies
3. Terawasinya lalu lintas hewan, Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas
5. Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat halal dan NKV
6. Jumlah peredaran obat hewan

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kinerja OPD tahun 2021 sesuai IKU Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota :

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET		Ket.
			2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya status kesehatan hewan ternak	Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS)	10 %	2 %	IKU Kepala OPD
2.	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peningkatan populasi ternak yang berkualitas</li> <li>2. Persentase peningkatan produksi ternak yang berkualitas</li> </ol>	10 % 10 %	2 % 2 %	IKU Kepala OPD
	Meningkatnya pemasaran produk peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Peningkatan Jumlah produk peternakan yang dipasarkan</li> <li>2. Persentase Jenis produk peternakan yang dipasarkan</li> <li>3. Persentase Kegiatan Promosi produk peternakan</li> </ol>	10 % 10 % 10 %	2 % 2 % 2 %	IKU Kepala OPD

**Tabel Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021**

NO.	INDIKATOR UATAMA	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS)	96,62 %	2%	2 %	4%	6%	8%	10%	10%
2	Persentase peningkatan populasi ternak yang berkualitas	88,60%	2%	2 %	4%	6%	8%	10%	10%
3	Persentase peningkatan produksi ternak yang berkualitas	88,60%	2%	2 %	4%	6%	8%	10%	10%
4	Persentase Peningkatan Jumlah produk peternakan	93,91%	2%	2 %	4%	6%	8%	10%	10%
5	Persentase Peningkatan Jenis produk peternakan	93,91%	2%	2 %	4%	6%	8%	10%	10%
6	Persentase Kegiatan Promosi Produk Peternakan	93,91%	2%	2 %	4%	6%	8%	10%	10%



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Disnak dan Keswan (Renja Disnak dan Keswan) tahun 2021. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kedepannya adalah :

1. Fungsi Perbibitan dan Produksi
2. Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Fungsi Pemasaran Produk Peternakan dan Prasarana dan Sarana
4. Fungsi Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Kelompok
5. Fungsi Kesekretariatan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Ir. INDRA SURIANI**  
NIP. 19670812 199303 2 011

TABEL T-C.5  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021								CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	MUSREMBANG	PAGU MUSREMBANG	POKIR DEWAN	PAGU POKIR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Urusan Pilihan</b>												
1	21	01											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kelancaran administrasi perkantoran</b>			736.379.380								751.106.968
1	21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat berupa : - Materai 6000 dan 3000 - Amplop - Lembar Disposisi - Jasa Pengiriman	Disnak & Keswan	12 bulan	11.342.700			DAU	12 bulan	11.569.554
1	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayainya rekening telepon, listrik, dan air dinas dan UPT	Disnak & Keswan dan UPT	12 bulan	90.000.000			DAU	12 bulan	91.800.000
1	21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium aparatur dinas	Disnak & Keswan	12 bulan	211.440.000			DAU	12 bulan	215.668.800
1	21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedia alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	Disnak & Keswan dan UPT	12 bulan	25.000.000			DAU	12 bulan	25.500.000
1	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	Disnak & Keswan dan UPT	12 bulan	55.000.000			DAU	12 bulan	56.100.000
1	21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	41.501.680			DAU	12 bulan	42.331.714
1	21	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Disnak & Keswan	1 paket	70.000.000			DAU	1 paket	71.400.000
03	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan untuk Dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	4.800.000			DAU		4.896.000
1	21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu disnak	Disnak & Keswan	12 bulan	50.525.000			DAU	12 bulan	51.535.500
1	21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan terikutinya live stock expo tk propinsi serta perjalanan dinas diluar daerah dengan lancar.	Disnak & Keswan	12 bulan	176.770.000			DAU	12 bulan	180.305.400
1	21	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			850.000.000					867.000.000
21	04	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya mobil untuk kepala dinas yang menunjang operasional tugas sehari-hari	Disnak & Keswan	1 unit	400.000.000			DAU		408.000.000
1	21	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	200.000.000			DAU		204.000.000
		02	42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung / kantor dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	250.000.000			DAU		255.000.000
3	02	03		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur dengan berpakaian seragam lengkap dengan atributnya</b>			43.000.000					43.860.000
3	02	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian dan perlengkapannya	Disnak & Keswan	100 Stel	43.000.000			DAU		43.860.000
1	21	05		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Meningkatnya sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan</b>			35.000.000					35.700.000
1	21	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	Disnak & Keswan	12 bulan	35.000.000			DAU	12 bulan	35.700.000
1	21	06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			37.320.000					38.066.400
1	21	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicetak dan digandakan serta laporan monev	Disnak & Keswan	12 bulan	36.072.000			DAU	12 bulan	36.793.440
03	02	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dan LKPJ	Disnak & Keswan	12 bulan	1.248.000					1.272.960
2	01			<b>Urusan Pangan</b>									
03	02	16		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani ternak</b>			37.400.000		12.600.000			38.148.000
03	02	16	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	- Terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani yang bergerak di bidang peternakan  - Terlaksananya seleksi dan penilaian CP/CL sebagai kelompok tani penerima bantuan		50 Kelompok  50 Kelompok	37.400.000	Pelatihan pertanian Nag. Tanjung Pauh Kec. Pangkalan Koto baru  Peningkatan kemampuan lembaga tani Nag. Simalanggang Kec. Payakumbuh	3.150.000  3.150.000	DAU	50 Kelompok  50 Kelompok	38.148.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021								CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	MUSREMBANG	PAGU MUSREMBANG	POKIR DEWAN	PAGU POKIR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	
														1
		- Terlaksananya penilaian kelas kelompok tani yang bergerak di sektor peternakan		22 kelompok		Pelatihan bagi petani dan kelompok tani Nag. Talang Maua Kec. Mungka	3.150.000						22 kelompok	
		- Terbitnya sertifikat peningkatan kelas kelompok yang bergerak di sektor peternakan		50 Kelompok		Pelatihan Pengurusan kelompok pertanian Nag. Mungko Kec. Luak	3.150.000						50 Kelompok	
2	01	<b>Urusan Pertanian</b>												
03	02	20	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan</b>	<i>Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian</i>			100.000.000							102.000.000
	03	02	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH)	Kabupaten Lima Puluh Kota	35 orang	100.000.000			DAU	12 bulan	102.000.000
						Terlaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat		6 Kali, 35 Orang						
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh		35 Orang						
2	01	21	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<i>Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak</i>			145.953.100							148.872.162
2	01	21	01	Pendataan masalah peternakan	Terlaksananya pendataan peternakan dan kesehatan hewan		4.056 Kali, 26 Petugas, 13 Kecamatan	42.000.000				DAU	4.056 Kali, 26 Petugas, 13 Kecamatan	42.840.000
					Terlaksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat Hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar	Kab. Lima Puluh Kota	40 Kali, 20 toko obat hewan, 13 Kecamatan						40 Kali, 20 toko obat hewan, 13 Kecamatan	
					Tersusunnya buku tentang data peternakan		1 Buku (50 cetak buku)						1 Buku (50 cetak buku)	
					Tersusunnya buku tentang gambaran penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan		1 Buku (30 cetak)						1 Buku (30 cetak)	
					Tersusunnya Data Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		1 Buku (7 Exp)						1 Buku (7 Exp)	
2	01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya Vaksinasi Rabies	Kab. Lima Puluh Kota	50.000 dosis	35.332.450				DAU	50.000 dosis	36.039.099
					Terlaksananya Vaksinasi SE	Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	5.000 dosis						5.000 dosis	
					Terlaksananya vaksinasi jembrana	Pangkalan dan Kapur IX	1.500 Dosis						1.500 Dosis	
					Terlaksananya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit hewan menular (PHM)	Kab. Lima Puluh Kota	200 sampel						200 sampel	
					Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi	Kab. Lima Puluh Kota	1.500 ekor						1.500 ekor	
					Terlaksananya penanggulangan kasus gigitan HPR	Kab. Lima Puluh Kota	Observasi HPR 150 ekor						Observasi HPR 150 ekor	
					Terlaksananya koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	Prov, Bvet, Kab/Kota, Kec	25 kali						25 kali	
					Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMZ) secara dini	Kab. Lima Puluh Kota	-1 Kali -39 Kali						-1 Kali -39 Kali	
					-Pendataan HPR (Hewan Pembawa Rabies) dan Hewan Beresiko PHMS									
					-Pemantauan, Pendeteksian PHMZ secara Dini									
					Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Kab. Lima Puluh Kota	1.500 ekor						1.500 pelayanan	
					Peningkatan SDM petugas Pelayanan Keswan dan Kesmavet	Kab. Lima Puluh Kota	2 Kali, 30 petugas						2 Kali, 30 petugas	
2	01	21	03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit menular Rabies dan AI	Kab. Lima Puluh Kota	- 50 ekor HPR/PHMZ - 1.500 Ekor	14.429.200				DAU	- 50 ekor HPR/PHMZ - 1.500 Ekor	14.717.784
					- Rabies/Ternak terjangkit PHMZ									
					- AI dan Penyakit Unggas									
2	01	21	21	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	Kab. Lima Puluh Kota	- 39 Kali - 460 Kali	46.360.250				DAU	- 39 Kali - 460 Kali	47.287.455
					- Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)									
					-Pengawasan di 5 TPH dan 2 RPU									
					Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	Kab. Lima Puluh Kota	400 Sampel						400 Sampel	





KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021								CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	MUSREMBANG	PAGU MUSREMBANG	POKIR DEWAN	PAGU POKIR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 01 23 07	Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Terlaksananya event pameran produk peternakan dan pengolahan hasil peternakan	Sumbar Expo, IKK Sarilamak	2 kali pameran	89.324.700					DAU		2 kali pameran	91.111.194
		Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui Expo Peternakan tingkat provinsi Sumatera barat	Prov. Sumatera Barat	1 kali								1 kali	
01 xx 23 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Kab.Lima Puluh Kota	60 Kali	3.636.000							60 Kali	3.708.720
2 01 24	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<i>Meningkatnya penerapan teknologi peternakan</i>			67.177.650								68.521.203
2 01 24 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan Alsinnak - Mesin chopper pengolah kompos - Mesin chopper pengolah pakan - Kendaraan bermotor roda tiga	Kabupaten Lima Puluh Kota	- 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit	57.352.050	Penyuluhan teknologi tepat guna Nag. Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan	4.200.000		152.000.000	DAU		Terlaksananya pengadaan Alsinnak - Mesin chopper pengolah kompos 1 Unit - Mesin chopper pengolah pakan i unit - Kendaraan bermotor roda tiga 1 unit	58.499.091
								Bantuan Kendaraan Motor Roda Tiga Kelompok Senada Nag. Batu Payuang Kec. LSH	38.000.000				
								Bantuan Kendaraan Motor Roda Tiga Kelompok Daladang Nag. Batu Balang Kec. Harau	38.000.000				
								Bantuan Kendaraan Motor Roda Tiga Kelompok Sapayuang Basamo Nag. Batu Payuang Kec. LSH	38.000.000				
								Bantuan Kendaraan Motor Roda Tiga Kelompok Makmur Nag. Batu Payuang Kec. LSH	38.000.000				
01 xx 24 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Kab.Lima Puluh Kota	50 kelompok	9.825.600							50 kelompok	10.022.112
	<b>JUMLAH</b>				2.940.018.050		35.340.000		593.270.000	DAU		DAU	2.998.818.411

Payakumbuh, Agustus 2020  
Ptt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**Ir. INDRA SURIANI**  
NIP. 19670812 199303 2 011